

---

## DINAMIKA POLITIK PROSES KEPUTUSAN IMPOR BERAS TAHUN 2018 DAN TAHUN 2021

Asran Jalal<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Politik Sekolah Pascasarjana, Universitas Nasional

Email : Asran\_jalal@yahoo.com

(Submission 02-09-2022, Revisions 19-10-2022, Accepted 25-10-2022).

### **Abstract**

*The rice import decision process in 2018 and 2021, creates different view on government elites and government elites with non-government elites. The government elites are Presiden Jokowi, the Coordinating Minister for the Economy, the Trade Minister, the Agriculture Minister, the Director Bulog, and DPR. Non-government elites are political parties, observers, civil society. The focus this article is first, to discuss the differences in the views of the Minister of Trade against the Director of Bulog and the Minister of Agriculture regarding the rice impor decision process in 2018 and 2021. Second, to discuss President Jokowi's decision to continue rice imports in 2018 and his decision to cancel rice imports in 2021. The argument of this paper is that the different views of government elites on the rice impor process in 2018 and 2021 are base on political-pragmatic interests versus ideolocal-strategic interests and interest of institution-organization. President Jokowi's decision to cancel the to import rice in 2021, because the rejection of the plan did not only come from the DPR as government elites, the refusal also came from the political party elite as non-government elite.*

**Keywords :** *rice import; government elite; non-government elite; Presiden Jokowi's decision.*

### **Abstrak**

Proses keputusan impor beras pada tahun 2018 dan tahun 2021, menimbulkan perbedaan pandangan pada elite-elite pemerintah dan elite-elite pemerintah dengan elite-elite non-pemerintah. Elite-elite pemerintah dimaksud yaitu Presiden Jokowi, Menko Ekonomi, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Direktur Bulog, dan DPR. Elite-elite non-pemerintah yaitu partai politik, pemerhati, dan masyarakat sipil. Fokus artikel ini adalah: pertama, mendiskusikan perbedaan pandangan Menteri Perdagangan berhadapan Direktur Bulog dan Menteri Pertanian tentang proses keputusan impor beras tahun 2018 dan tahun 2021. Kedua, mendiskusikan keputusan Presiden Jokowi melanjutkan impor beras tahun 2018 dan keputusannya membatalkan impor beras tahun 2021. Argumen tulisan ini adalah perbedaan pandangan elite-elite pemerintah dalam proses impor beras tahun 2018 dan 2021 dilandasi kepentingan politis-pragmatis versus kepentingan ideologis-strategis dan kepentingan organisasi-institusi. Keputusan Presiden Jokowi membatalkan rencana impor beras tahun 2021, karena penolakan rencana tersebut bukan hanya berasal dari DPR sebagai elite-elite pemerintah, penolakan juga datang dari elite partai politik sebagai elite non-pemerintah.

**Kata Kunci :** impor beras; elite pemerintah; elite non-pemerintah; keputusan Presiden Jokowi.

## **PENDAHULUAN**

Rencana pemerintah mengimpor beras pada tahun 2018 dan tahun 2021 menimbulkan perbedaan pandangan pada elite-elite pemerintah, dan perbedaan pandangan elite-elite pemerintah dengan elite-elite non pemerintah. Elite-elite pemerintah yang terlibat secara langsung pada tahun 2018 yaitu Presiden Jokowi, Menteri Koordinator Ekonomi (Menko Ekonomi) Darmin Nasution, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukito, Direktur Badan Urusan Logistik (Direktur Bulog) Budi Waseso, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman dan DPR. Elite-elite non-pemerintah yaitu pemerhati dan masyarakat sipil.

Elite-elite pemerintah terlibat secara langsung proses keputusan impor beras tahun 2021 yaitu Presiden Jokowi, Menko Ekonomi Airlangga Hartarto, Mendag Muhammad Lutfi, Direktur Bulog Budi Waseso, Mentan Muhammad Lutfi, dan anggota-anggota DPR. Elite-elite non-pemerintah yaitu elite partai politik, pemerhati, dan masyarakat sipil.

Rencana impor beras pada tahun 2018 disampaikan oleh Mendag. Rencana impor beras ini mendapat respon negatif berupa penolakan dari elite-elite pemerintah lainnya yaitu dari Mentan, Direktur Bulog, dan DPR. Respon negatif juga berasal dari elite-elite non-pemerintah, yaitu pemerhati, dan masyarakat sipil, dengan argumentasi yang beragam. Presiden Jokowi kemudian memutuskan tetap melanjutkan impor beras pada tahun 2018.

Rencana impor beras pada tahun 2021 dikemukakan oleh Menko Ekonomi pada awal Maret 2021. Impor beras dimaksud mendapat respon positif berupa dukungan dari Mendag dengan berbagai pertimbangannya. Rencana impor beras dimaksud mendapat respon negatif dari Dirut Bulog, Mentan, dan DPR sebagai sesama elite-elite pemerintah yang menyatakan tidak mendukung rencana impor beras tersebut dengan berbagai alasannya ([nasional.kompas.com](http://nasional.kompas.com)). Respon negatif juga berasal dari elite-elite non-pemerintah yaitu, partai politik, pemerhati, dan masyarakat sipil, dengan argumennya masing-masing. Presiden Jokowi kemudian memutuskan membatalkan impor beras untuk tahun 2021 ([Setkab.go.id](http://Setkab.go.id)).

Permasalahan dari fenomena tersebut di atas adalah: *Pertama*, rencana impor beras tahun 2018 dan tahun 2021 melahirkan respon negatif berasal dari internal institusi pemerintah sendiri di bawah koordinasi Menko Ekonomi. Masalah tersebut menimbulkan pertanyaan, kepentingan apa yang mendasari perbedaan pandangan Mendag dengan Mentan dan Direktur Bulog dalam proses keputusan impor beras tahun 2018 dan tahun 2021? *Kedua*, Presiden Jokowi memutuskan impor beras tahun 2018 tetap berlanjut dan membatalkannya pada tahun 2021, kedua rencana tersebut sama-sama mendapat respon negatif dari DPR. Masalah tersebut melahirkan pertanyaan, apa pertimbangan utama Presiden Jokowi membatalkan impor beras pada tahun 2021? Apakah tekanan DPR lebih kuat dibandingkan tekanan DPR pada tahun 2018?.

- **Tinjauan Pustaka**

Bagian ini membahas tinjauan studi yang bersifat konsep dan teori yang dapat membantu membahas dan menganalisis permasalahan dan pertanyaan penelitian yang diajukan pada bagian tersebut di atas. Tinjauan studi dimaksud adalah konsep atau teori perumusan kebijakan publik, teori konflik politik, dan teori relasi presiden dengan legislatif. Dalam proses perumusan kebijakan pada suatu negara terdapat elite-elite yang berperan yaitu: *Pertama*, elite pemerintah yang terdiri dari presiden atau perdana menteri, wakil presiden atau wakil perdana menteri, para menteri, pejabat tinggi kementerian, parlemen, dan Mahkamah Agung. *Kedua*, elite non-pemerintah yaitu partai politik dan kelompok-kelompok masyarakat dengan berbagai kepentingannya (Lester & Stewart, 2000). Kepentingan yang melandasi perilaku elite dalam merumuskan suatu kebijakan bisa berbentuk kepentingan politis, kepentingan organisasi, kepentingan pribadi, dan kepentingan ideologi.

*Pertama*, kepentingan politis. Para aktor dalam proses merumuskan keputusan suatu kebijakan dilandasi oleh kepentingan partai politiknya atau kepentingan kelompoknya. *Kedua*, kepentingan organisasi. Para elite dalam proses merumuskan kebijakan dilandasi pertimbangan untuk mencapai tujuan organisasi institusinya berupa memperlancar program-program organisasinya. *Ketiga*, kepentingan pribadi, pertimbangan aktor dalam proses perumusan kebijakan dilandasi kepentingan pribadi aktor seperti keuntungan bisnis, jabatan, dan reputasinya di hadapan rakyat. *Keempat*, kepentingan ideologi. Elite-elite dalam memutuskan suatu kebijakan dengan pertimbangan kepentingan rakyat dan kepentingan negara (Anderson, 1969).

Pembahasan permasalahan proses keputusan impor beras pada tahun 2018 dan tahun 2021 pada tulisan ini, merujuk pada konsep atau teori konflik politik. Sikap pro dan kontra antara menteri dalam proses keputusan impor beras tahun 2018 dan 2021 adalah bagian dari konflik politik. Menurut Duverger (1991) dan Rauf (2001), konflik politik adalah perbedaan pandangan antar kelompok masyarakat, elite dengan pemerintah dan antarelite di pemerintahan, kelompok masyarakat dengan pemerintah tentang suatu kebijakan yang akan atau sedang dijalankan negara. Konflik merupakan bagian yang sudah melekat dalam proses-proses politik, karena masing-masing elite yang terlibat dalam perumusan kebijakan, dilandasi kepentingan yang berbeda (Nordlinger, 1972).

Konflik politik dapat berupa konflik non-kompromi dan konflik-kompromi. Konflik non-kompromi merupakan aktor-aktor yang terlibat konflik tidak memiliki peluang melakukan perdamaian, dan hasil akhir perbedaan hanya dirasakan oleh aktor pemenang. Konflik-kompromi, merupakan aktor-aktor yang berkonflik memberi peluang untuk menempuh jalan kompromi, implikasinya aktor-aktor yang terlibat konflik menikmati hasil konflik (Conn, 1971).

Pemerintah dapat mengendalikan konflik politik melalui cara persuasif. Conn (1971) menjelaskan beberapa strategi resolusi konflik politik berkaitan dengan pembuatan keputusan politik melalui cara persuasif, yaitu melalui proses keputusan politik, pembuatan keputusan dan tahap pelaksanaan keputusan. Proses keputusan politik dimaksud yaitu tahap politisasi, yakni apabila terdapat konflik pada

masyarakat, pihak yang berkonflik akan mengadakan politisasi dengan cara memasyarakatkan tuntutanannya melalui media menjadi isu politik. Pihak yang berkonflik akan mengajukan tuntutan pada pemerintah agar penyelesaian konflik melalui keputusan politik. Tahap pembuatan keputusan, pihak yang berkonflik akan mempengaruhi pihak pembuatan keputusan politik untuk mengabdikan tuntutanannya. Tahap pelaksanaan keputusan, tahap pemerintah melaksanakan keputusan politik dalam wujud anggaran dan peraturan hukum, hal yang bisa menyelesaikan konflik dalam masyarakat.

Konflik politik bisa terjadi antara eksekutif dengan legislatif tentang suatu kebijakan tertentu (Lijphart, 1992). Konflik antara kedua institusi negara tersebut dapat mengarah pada jalan buntu (*political deadlock*) (Linz, 1990), yakni kedua belah pihak tidak memperoleh kesepakatan tentang isu yang diperdebatkan. Faktornya antara lain adalah, masing-masing institusi merasa sama-sama memperoleh dukungan dari rakyat melalui pemilihan umum (Mainwaring, 1993). Penyelesaian konflik antara presiden dan legislatif di antaranya adalah salah satu pihak menyesuaikan diri dengan kepentingan pihak lainnya, presiden bisa mengikuti kehendak DPR atau sebaliknya. (Romli, 2019; Jalal, 2021).

Tinjauan pustaka dalam bentuk penjelasan teoritik tentang perumusan kebijakan publik, konflik politik, dan relasi presiden dengan DPR tersebut di atas, digunakan sebagai bahan acuan untuk membahas dan mendiskusikan fenomena perbedaan pandangan antara elite pemerintah, perbedaan pandangan antara elite non-pemerintah dengan elite pemerintah dalam proses keputusan impor beras tahun 2018 dan tahun 2021.

## **METODE**

Pembahasan pada artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara mendeskripsi fenomena yang diteliti dan mengutamakan interpretasi (Jensic, 2011). Data penelitian ini besumber dari studi kepustakaan berupa data dan informasi berasal dari buku, jurnal, website institusi dan media massa online. Website yang digunakan dalam penelitian yaitu Setkab.go.id, berkas.dpr.go.id.

Analisis penelitian menggunakan tehnik konten analisis (*content analysis*) berupa kata-kata/kalimat inti, frasa kunci dari sumber tertulis (Breuning, 2011; Harrison, 2001). Sumber tertulis dimaksud dalam penelitian ini adalah pernyataan yang disampaikan aktor-aktor yang terlibat dalam penelitian ini, yang di-*publish* melalui media website dan media massa online. Pada tahap ini, analisis data dilakukan dengan tiga tahap. *Pertama*, memilih frasa atau kalimat inti yang sesuai dengan pertanyaan penelitian. *Kedua*, menulis frasa atau kalimat inti ke dalam hasil penelitian, dan *ketiga*, mendiskusikan data dengan merujuk pada pertanyaan penelitian dan konsep dan teori yang ditulis pada studi pustaka.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Rencana pemerintah hendak impor beras tahun 2018 disampaikan oleh Mendag. Rencana tersebut direspon positif oleh Menko Perekonomian, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Presiden Jokowi dengan pertimbangannya masing-masing. Pertimbangan para elite dimaksud dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Pertimbangan Elite Pemerintah Terhadap Impor Beras Tahun 2018

<b>Elite</b>	<b>Argumen</b>
Mendag	Kebutuhan nasional dan menghindari dampak politis, hasil keputusan rapat dengan Menko Ekonomi
Menko Ekonomi	Kebutuhan dalam negeri
Wapres Jusuf Kalla	Stabilitas harga beras dalam negeri
Presiden Jokowi	Cadangan untuk antisipasi bencana alam dan pengendalian harga beras dalam negeri

*Sumber: mediaindonesia.com, nasional.kompas.com.*

Pertimbangan elite pemerintah terhadap impor beras pada Tabel 1, secara garis besar memberikan penjelasan: *Pertama*, terdapat persamaan pertimbangan untuk melakukan impor yakni untuk menstabilkan harga beras dalam negeri, pengertian lain impor beras diperlukan agar harga beras tidak naik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah meskipun istilahnya berbeda-beda. *Kedua*, argumen yang dikemukakan hanya bentuk perkiraan dan kekhawatiran, semua pertimbangan tersebut belum terjadi. Masalah harga beras, kondisinya tidak ada gejolak harga di pasaran. Pertimbangan aktor-aktor pemerintah penggagas impor beras, dilandasi kepentingan ideologi khususnya untuk kepentingan rakyat.

Rencana impor beras tahun 2018 ini mendapat respon negatif dari elite internal pemerintah lainnya berupa penolakan. Para elite dimaksud yaitu Mentan, Direktur Bulog, dan DPR. Respon negatif DPR antara lain berasal dari Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Viva Yoga Mauladi, Ketua Komisi IV DPR, Edhy Prabowo, dan Zulkifli Hasan, anggota DPR asal Fraksi Partai Amanat Nasioal (F-PAN) yang menjabat sebagai Ketua MPR dengan alasan dan pertimbangan masing-masing sebagaimana terlihat pada Tabel 2.

**Tabel 2.** Respon Negatif Elite-Elite Pemerintah Impor Beras Tahun 2018

<b>Elite</b>	<b>Argumen</b>
Mentan	Tidak sesuai visi kementerian, ketersediaan beras cukup
Direktur Bulog	Indonesia negara pertanian, pemborosan uang negara, ketersediaan beras mencukupi
Wakil Ketua DPR	Merugikan petani
Ketua Komisi IV DPR	Managemen pengeloaan distribusi pangan pengendalian harga beras lemah
Wakil Ketua Komisi IV	Bertentangan dengan UU No. 18 Tahun 2012 tentang pangan, merugikan petani

*Sumber: pertanian.go.id, nasional.kompas.com, pertanian.go.id, Finance.com, bisnis.tempo.co.*

Mentan memberikan respon negatif, dilandasi kepentingan institusi-organisasi. Impor beras dianggap tidak sejalan dengan visi Kementerian Pertanian, dan menolak krisis ketersediaan beras karena ketersediaan beras masih cukup aman.

Alasan Direktur Bulog merespon secara negatif impor beras dilandasi kepentingan ideologis-strategis. Alasannya menolak impor beras tahun 2018 karena bertentangan dengan kondisi negara Indonesia sebagai negara pertanian, tradisi petani sudah merupakan bagian budaya dan tradisi bangsa Indonesia. Alasan lainnya adalah impor beras merupakan pemborosan anggaran negara, karena cadangan beras masih mencukupi. Respon negatif berasal dari DPR dilandasi kepentingan ideologi. Penolakan impor dengan alasan bertentangan dengan konstitusi negara dan impor beras merupakan kebijakan yang sangat merugikan petani.

Kalangan masyarakat sipil (*civil society*) sebagai elite institusi non-pemerintah, ada yang memberikankan respon negatif dan ada yang memberikan respon positif tentang impor beras. Elite non-pemerintah yang merespon negatif, yaitu: anggota Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Ketua KPPU), Syarkawi Rauf, dan Ginting, peneliti Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR (pemerhati). Elite-non pemerintah yang memberi respon positif yakni Moeldoko, Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (Ketua HKTI). Alasan elite-elite non-pemerintah tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3.** Respon Negatif Elite-Elite Non-Pemerintah Impor Beras Tahun 2021

<b>Elite</b>	<b>Kontra dan Alasan</b>	<b>Pro dan Alasan</b>
Anggota Ombudsman RI	Tidak sesuai perundangan, bisa menimbulkan penyimpangan kekuasaan	
Ketua KPPU	Merugikan petani	
Pemerhati	Tata kelola beras dan pangan lemah	
Ketua HKTI		Kebutuhan nasional, sudah melalui prosedur yang berlaku

Sumber: *mediaindonesia.com, cnnindonesia.com, bisnis.tempo.co, berkas.dpr.go.id*

Para elite non-pemerintah yang menolak rencana impor beras tahun 2018 yaitu anggota Ombudsman RI, Ketua KPPU, dan pemerhati. Respon negatif elite-elite tersebut dilandasi kepentingan ideologi yakni untuk kepentingan petani, karena pemerintah hendak impor beras pada saat kondisi petani sedang menikmati panen padi. Kebijakan impor dianggap sangat merugikan petani Indonesia. Alasan lainnya adalah impor beras bertentangan dengan perundangan yang berlaku, dan dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan dimaksud bisa berbentuk keuntungan ekonomi secara individual atau kelompok dalam proses impor beras. Respon positif elite non-pemerintah hanya berasal dari Ketua HKTI, dengan alasan bahwa impor beras merupakan kebutuhan nasional dan rencana pemerintah tersebut sudah melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku. Respon Ketua HKTI yang demikian, karena yang bersangkutan posisinya sebagai pembantu

presiden yakni sebagai Kepala Staf Kepresidenan Presiden Jokowi, sesuatu yang tidak mungkin responnya berseberangan dengan rencana presiden.

Keputusan Presiden Jokowi melalui Mendag adalah tetap melaksanakan impor beras pada tahun 2018. Sepanjang tahun 2018, pemerintah melaksanakan impor beras sebanyak 1,78 juta ton atau senilai lebih dari Rp12,1 triliun. Impor berasal dari India, Pakistan, Vietnam dan Thailand. Pertimbangan yang dikemukakan sama seperti sebelumnya, yakni untuk mengantisipasi terjadinya gejolak harga beras akibat kemungkinan adanya bencana alam.

Rencana impor beras tahun 2021 berawal dari rencana pemerintah melakukan impor beras sebanyak satu juta ton dari Thailand untuk tahun 2021. Rencana impor beras tersebut dikemukakan oleh Menko Ekonomi, Airlangga Hartarto pada awal Maret 2021, Mendag Muhammad Lutfi dan diperkuat oleh Presiden Jokowi. Pertimbangan elite-elite dimaksud dapat dilihat pada Tabel 4.

**Tabel 4.** Pertimbangan Elite-Elite Pemerintah Impor Beras Tahun 2021

<b>Elite</b>	<b>Pertimbangan</b>
Menko Ekonomi	Mengendalikan harga
Mendag	Cadangan beras terbatas, sulit memperkirakan produksi beras akibat musim hujan, untuk pesediaan, keputusan rapat kabinet
Presiden Jokowi	Kekhawatiran dampak pandemi Covid-19 dan akan terjadinya bencana banjir tahunan berpengaruh pada hasil panen.

*Sumber: nasioal.kompas.com, nasional.sindonews.com, cnbcindonesia.com.*

Pertimbangan elite-elite pemerintah merencanakan impor beras sebagaimana pada Tabel 4 memberikan beberapa penjelasan. *Pertama*, terdapat persamaan argumen dasar yang dikemukakan, yaitu dalam rangka mengendalikan harga dalam negeri dan sebagai cadangan kebutuhan dalam negeri. *Kedua*, pertimbangan aktor pemerintah pro impor beras ini tidak muncul landasan pertimbangan yang kuat, hanya bersifat perkiraan. Pandemi Covid-19, kemungkinan hasil panen akan menurun. Logikanya, karena petani mengalami pandemi Covid-19, tidak akan bisa berkerja secara maksimal. Kemungkinan akan terjadinya banjir tahunan di berbagai daerah dengan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, diperkirakan berdampak pada hasil panen petani. Logikanya apabila banjir terjadi, akan menghancurkan hasil panen petani.

Rencana impor beras tahun 2021 mendapat respon negatif dalam bentuk penolakan dari elite-elite pemerintah lainnya, yaitu Direktur Bulog, Mentan dan DPR. Respon DPR berasal dari anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin (1), anggota Komisi IV DPR Julie Sutrisno (2), anggota Komisi VI DPR Mufti Anam. Respon elite-elite tersebut dirumuskan pada Tabel 5.

**Tabel 5.** Respon Negatif Elite-Elite Pemerintah Impor Beras Tahun 2021

<b>Elite</b>	<b>Argumen</b>
Dirut Bulog	Indonesia bisa menjadi negara swasembada pangan, ketersediaan beras cukup, panen sedang berlangsung, rapat sebelumnya tidak mengagendakan impor beras
Mentan	Bertentangan dengan visi kementerian, petani menikmati panen, persediaan beras masih cukup
Anggota Komisi IV DPR (1)	Tidak mempertimbangkan kesejahteraan petani, cadangan beras cukup
Anggota Komisi IV DPR (2)	Melemahkan semangat petani untuk kerja keras
Anggota Komisi VI DPR	Merugikan petani, petani sedang menikmati hasil produksi pertanian

Sumber: *nasional.kompas.com, ekonomi.bisnis.com, nasional, sindonews.com*

Respon negatif yang diberikan Dirut Bulog rencana impor dilandasi kepentingan ideologis-strategis. Landasan dapat dilihat dari alasannya menolak rencana impor beras tahun 2021, karena hendak menjadikan Indonesia sebagai negara swasembada pangan, apalagi cadangan beras dalam negeri tidak ada masalah. Alasan Mentan memberikan respon negatif rencana impor beras dilandasi kepentingan organisasi-institusi. Argumennya, menolak impor beras karena bertentangan dengan visi kementerian yang dipimpinnya. Respon negatif anggota DPR dilandasi kepentingan ideologis, alasan yang dikemukakan adalah, impor beras merupakan kebijakan yang tidak mempertimbangkan kesejahteraan petani, karena petani sedang panen padi dan ketersediaan cadangan beras masih cukup.

Rencana impor beras tahun 2021 juga direspon secara negatif oleh elite non-pemerintah, yaitu elite partai politik, pemerhati dan masyarakat sipil. Respon elite partai politik berasal dari Hastu Kristyanto, Sekjen PDI-P (elite PDI-P) dan Riyono, Ketua Bidang Tani dan Nelayan DPP PKS (elite PKS). Respon pemerhati berasal dari ekonom *Institute for Development of Economics and Finance* (Indef) Rusli Abdullah (pemerhati 1), dan Ade Surya T, peneliti Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR (pemerhati 2). Respon masyarakat sipil berasal dari Sutarto Ali Moeso, Ketua Umum Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi). Argumen elite-elite non-pemerintah tersebut dapat dilihat pada Tabel 6.

Respon negatif elite PDI-P dilandasi kepentingan ideologi dan kepentingan organisasi partai politik. Kepentingan ideologi ini terlihat pada argumen yang dikemukakannya, bahwa impor beras yang akan dilakukan pemerintah bertentangan dengan visi bangsa Indonesia, yang menghendaki kedaulatan bidang pangan. Kepentingan organisasi partai terdapat pada alasannya yang menyatakan bahwa, impor beras bertentangan dengan visi dan program PDI-P, yang sudah memulai menggerakkan masyarakat untuk menanam aneka tanaman pangan non-beras (singkong, ubi jalar, kentang, jagung, dan kacang). Tujuannya adalah agar masyarakat tidak terlalu tergantung pada beras. Respon negatif elite PKS dilandasi oleh kepentingan ideologi, alasan yang dikemukakan adalah impor beras tidak

memberikan rasa keadilan pada petani, petani sudah memberikan kontribusi pada ketersediaan pangan, dengan terus bertani dalam kondisi pandemi. Respon negatif yang berasal dari pemerhati 1, pemerhati 2, dan Perpadi, dilandasi kepentingan ideologi. Impor beras dianggap sebagai kebijakan tidak berpihak pada petani, karena petani sedang melakukan panen raya, dan harga gabah yang stabil.

**Tabel 6.** Respon Negatif Elite-Elite Non-Pemerintah Impor Beras Tahun 2021

Elite	Alasan
Elite PDI-P	Bertentangan dengan cita-cita Indonesia hendak mencapai kedaulatan pangan, tidak sejalan dengan visi partainya
Elite PKS	Tidak memberikan rasa keadilan pada petani, dan petani sudah berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi
Pemerhati 1	Harga gabah stabil dan tidak mempertimbangkan kondisi petani
Pemerhati 2	Merugikan petani yang sedang panen raya
Perpadi	Tidak berpihak petani karena musim panen

Sumber: *dxchanel.com, republika.co.id, berkas.dpr.go.id, pks.id.*

Presiden Jokowi akhirnya mengambil keputusan membatalkan impor beras tahun 2021. Pertimbangannya adalah karena munculnya respon negatif dalam bentuk perdebatan. Kondisi ini dapat merugikan petani, karena perdebatan yang berkepanjangan berdampak pada stabilitas harga beras di pasaran (Setkab.go.id).

Bagian pembahasan ini mendiskusikan perbedaan pandangan antara Mentan dan Dirut Bulog dengan Mendag pada proses keputusan impor beras tahun 2018 dan tahun 2021. Respon negatif dari Mentan dalam bentuk penolakan impor beras dilandasi kepentingan organisasi-institusi kementerian yang dipimpinnya. Argumennya menolak impor beras karena tidak sesuai dengan visi Kementerian Pertanian yang mengutamakan hasil produksi petani. Respon negatif Dirut Bulog, dilandasi kepentingan ideologis-strategis. Alasannya tidak mendukung impor beras yaitu: *Pertama*, Indonesia merupakan negara pertanian, dan masih bisa meningkatkan produksi beras hasil pertanian. *Kedua*, pemborosan uang negara karena ketersediaan beras dalam negeri masih mencukupi. Pertimbangan Mendag mendukung impor beras, dilandasi kepentingan politis-pragmatis yaitu pertimbangannya dilandasi upaya untuk menyesuaikan diri dengan rencana Presiden Jokowi, Wakil Presiden, dan Menko Ekonomi sebagai atasannya. Pertimbangannya mendukung impor beras dengan alasan merupakan kebutuhan nasional dan hasil keputusan rapat dengan Menko Ekonomi.

Perbedaan pandangan antara Mendag dengan Dirut Bulog dan Mentan tentang impor beras tahun 2018 dan tahun 2021 dilandasi kepentingan yang berbeda. Mendag merespon positif impor beras dilandasi kepentingan politis-pragmatis, yakni berusaha menyesuaikan responnya dengan rencana Presiden Jokowi dan Menko Ekonomi. Dirut Bulog merespon negatif impor beras dilandasi kepentingan ideologis-strategis. Impor beras diapandang tidak sesuai dengan visi bangsa Indonesia, hendak menjadikan Indonesia negara swasembada beras. Mentan merespon negatif impor beras dilandasi kepentingan organisasi-institusi. Impor

beras dipandang tidak sejalan dengan visi kementerian yang dipimpinnya yakni mengutamakan produksi petani Indonesia.

Mengapa Presiden Jokowi tetap memutuskan impor beras tahun 2018 di tengah-tengah penolakan DPR dan membatalkannya pada tahun 2021? Apakah penolakan DPR lebih besar pada tahun 2021 dibandingkan pada tahun 2018?

*Pertama*, faktor partai politik. Elite partai politik yang memberikan respon negatif impor beras tahun 2021 adalah elite PDI-P dan elite PKS. Respon elite partai politik ini tidak muncul pada rencana impor beras tahun 2018. Partai politik tidak memiliki peran secara formal dalam perumusan keputusan, namun memiliki peran yang kuat dengan mekanisme mengendalikan anggota di DPR dan Kabinet. *Kedua*, faktor DPR berkaitan dengan pertanyaan apakah respon negatif DPR lebih kuat pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2018? Realitasnya tidak demikian, respon negatif DPR impor beras pada tahun 2021 tetap kuat, seperti yang terjadi pada tahun 2018. Faktor yang mendekati adalah respon negatif yang berasal dari elite PDI-P dan elite PKS. PDI-P merupakan partai pemenang pada pemilihan umum tahun 2014, dan partai pendukung utama Presiden Jokowi. PKS merupakan partai yang dikenal kritis dalam menyikapi kebijakan-kebijakan pemerintah.

Respon negatif DPR bersamaan dengan respon negatif elite-elite partai politik, merupakan faktor yang paling mendekati pertimbangan Presiden Jokowi memutuskan membatalkan impor beras tahun 2021. Alasan yang disampaikan Presiden Jokowi memutuskan membatalkan impor beras tahun 2021 seperti yang dikemukakan pada pembahasan sebelumnya adalah untuk menghindari perdebatan yang meluas, yang dapat merugikan petani karena berdampak pada stabilitas harga di pasaran. Perdebatan yang meluas dimaksud Presiden Jokowi adalah perdebatan dengan DPR dan perdebatan dengan elite PDI-P dan elite PKS.

Keuntungan yang melandasi perilaku elite dalam proses merumuskan suatu kebijakan, sebagaimana diuraikan pada bagian tinjauan pustaka yaitu, kepentingan politis, kepentingan organisasi, kepentingan pribadi, dan kepentingan ideologi. Perilaku elite dalam prakteknya dapat dipengaruhi satu kepentingan saja, juga bisa dipengaruhi lebih dari satu kepentingan (kombinasi). Perilaku elite dipengaruhi lebih dari satu kepentingan terlihat pada elite PDI-P. Respon negatif yang diberikannya pada impor beras tahun 2021, dianggap tidak sejalan dengan kepentingan ideologi yakni bertentangan dengan visi bangsa Indonesia menghendaki kedaulatan pangan. Impor beras tidak sesuai dengan kepentingan partai politiknya, yakni bertentangan dengan visi organisasi PDI-P yang sedang menggerakkan masyarakat untuk menanam tanaman non-beras.

Keputusan Presiden Jokowi melanjutkan impor beras pada tahun 2018 dan membatalkannya pada tahun 2021, mengakhiri konflik politik baik perbedaan pandangan kasus impor beras antar elite pemerintah maupun perbedaan elite pemerintah dengan elite non-pemerintah. Hal ini memberikan penjelasan bahwa teori konflik yang diuraikan pada tinjauan pustaka, yang menegaskan keputusan politik merupakan salah satu mekanisme resolusi konflik politik secara persuasif, memiliki relevansi dengan kasus yang dibahas. Konflik sesama elite pemerintah dan konflik elite pemerintah dengan dengan elite-elite non-pemerintah termasuk kategori konflik kompromi.

Perbedaan pendapat dan pandangan Presiden Jokowi dengan DPR pada proses keputusan impor beras tahun 2018 dan tahun 2021, memperkuat teori yang diuraikan pada bagian tinjauan pustaka yang menyatakan, konflik politik bisa terjadi antara presiden dengan DPR pada sistem presidensial tentang suatu kebijakan, memiliki relevansi pada kasus yang dibahas. Konflik presiden dengan DPR dalam pengertian perbedaan pandangan, pada kasus tersebut tidak melahirkan jalan buntu (*deadlock*), karena salah satu pihak dapat menyesuaikan dengan kehendak pihak lainnya. Presiden Jokowi mampu menyesuaikan keputusannya dengan sikap dari DPR pada kasus impor beras tahun 2021, sebaliknya DPR bersedia menyesuaikan dengan kehendak Presiden Jokowi pada kasus impor beras tahun 2018.

## **SIMPULAN**

Perbedaan pandangan antarelite pemerintah yaitu antara antara Mentan dan Dirut Bulog Budi Waseso memberikan respon negatif impor beras berhadapan dengan Mendag yang pro impor beras pada proses keputusan impor beras tahun 2018 dan tahun 2021 dilandasi perbedaan kepentingan, yaitu antara kepentingan institusi-organisasi dan kepentingan ideologi-strategis berhadapan dengan kepentingan politis-pragmatis. Respon negatif Mentan soal impor beras dilandasi kepentingan institusi-organisasi, impor beras tidak sesuai visi kementerian yang dipimpinnnya. Respon negatif Direktur Bulog dilandasi kepentingan ideologi-strategis, hendak menjadikan Indonesia sebagai negara pertanian menjadi negara swasembada pangan. Pertimbangan Mendag mendukung impor beras dilandasi kepentingan politis-pragmatis yakni menyesuaikan diri dengan rencana atasannya.

Keputusan Presiden Jokowi membatalkan rencana impor beras tahun 2021, karena hendak menghindari perdebatan dengan DPR dan elite PDI-P dan elite PKS secara bersamaan, dan menghindari dampaknya pada stabilitas harga beras. Presiden Jokowi memilih menyesuaikan keputusannya dengan aspirasi DPR guna mencegah polemik yang lebih luas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anderson, James E. (1969). *Public Policy Making*, New York Hplt, Rinehart and Winston, 2end ed.
- Breuning, Marijke. (2011). *Content Analysis*, John T. Ishiyama & Marijke Breuning (Ed), *21<sup>st</sup> Century Political Science ARefernce Handbook*, Los Angeles-London, New Delhi, Singapore, Wasington DC: Sage Publication Inc.
- Conn, Paul. (1971). *Conflict and Decision Making: An Introduction to Political Science*: New York: Harper& Row Publisher.
- Duverger, Maurice. (1991). *Sosiologi Politik* (terjemahan Daniel Dhakidae), Jakarta: Rajawali.

Nordlinger, Eric A. (1972). *Conflict Regulation of in Divided Societies*, Center for International Affairs, Harvard University.

Harrison, Lisa. (2001). *Political Research: An Introductin*, Routledge: Psychology Press.

Jalal, Asran. (2021). Sistem Presidensial Indonesia Masa Kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Budiono (2004-2014). *Populis, Jurnal Sosial dan Humaniora*. Vol 6, No 2.

Jensic, Alicia. (2011). Qualitative VS Quantitative Research, John T. Ishiyama & Marijke Breuning *21<sup>st</sup> Century Political Science A Refernce Handbook*, Los Angeles-London, New Delhi, Singapore, Wasington DC: Sage Publication Inc.

Lester, James P. & Joseph Stewart. (2000). *Public Policy: An Evolutionary Approach*. Australia: Wardswort, Scond Edition.

Lijphart, Arend. (1992). "Introduction", Arend Lijphart (Ed), *Parliamentary Versus Government*, New York, Oxford University Press, 1992.

Linz, Juan "The Perils of Presidensialism, *Journal of Democracy* 1 (1) 51-69.  
DOI:10.1353/jod.1990.0011.

Mainwaring, Scott. (1993). "Presidentialisme, Multipartism, and Democracy: The Difficult Combination, dalam *Comparative Political Studies*, Vol.26, No.2.

Rauf, Maswadi. (2001). *Konsensus dan Konflik Politik Sebuah Penjajagan Teoritik*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.

Romli, Lili. (2019). *Sistem Presidensial Indonesia Dinamika, Problematik, dan Penguatan Kelembagaan*, Malang: Setara Press.

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4544836/sector-pertanian-dorong-pertumbuhan-ekonomi-ri>.

<https://bisnis.tempo.co/read/1139883/indonesia-surplus-beras-tapi-masih-impor-kenapa/full&view=ok>.

<https://bisnis.tempo.co/read/1176867/pakar-bantah-pernyataan-jokowi-soal-impor-beras-menurun/full&view=ok>.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20151026202002-92-87517/siasati-el-nino-pemerintah-buka-impor-beras-15-juta-ton>.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20151026202002-92-87517/siasati-el-nino-pemerintah-buka-impor-beras-15-juta-ton>.

<https://nasional.kompas.com/read/2019/02/18/00072271/alasan-jokowi-tetap-impor-meski-stok-cadangan-beras-surplus>.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20151026202002-92-87517/siasati-el-nino-pemerintah-buka-impor-beras-15-juta-ton>.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180115193828-92-269095/kppu-impor-beras-bisa-bikin-petani-merugi>

<https://bisnis.tempo.co/read/1544098/buwas-sebut-bulog-dekati-produsen-bakal-jual-minyak-goreng-murah-tahun-depan>

<https://mediaindonesia.com/opini/185240/kontroversi-impor-beras>

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4180230/dpr-pertanyakan-kebijakan-impor-beras>

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20210318/12/1369543/dpr-tanya-soal-impor-beras-mentan-saya-tak-ada-legal-standing>.

<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/27/08315141/awal-mula-polemik-impor-beras-ditolak-dpr-hingga-presiden-jokowi-turun?page=all>.

[dxchannel.com/economics/rencana-impor-beras-dpr-minta-mendag-tak-ambil-kebijakan-berbeda-dengan-presiden](https://dxchannel.com/economics/rencana-impor-beras-dpr-minta-mendag-tak-ambil-kebijakan-berbeda-dengan-presiden).

<https://www.republika.co.id/berita/qu4m56383/pemerintah-harus-hatihati-tentukan-kebijakan-impor-beras>.

<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/27/08315141/awal-mula-polemik-impor-beras-ditolak-dpr-hingga-presiden-jokowi-turun?page=all>.

<https://nasional.kompas.com/read/2021/04/22/06243571/pengakuan-dan-janji-presiden-jokowi-soal-kebijakan-impor-beras?page=all>.

<https://setkab.go.id/pernyataan-presiden-ri-mengenai-kebijakan-impor-beras-26-maret-2021-di-istana-merdeka-provinsi-dki-jakarta/>.

<https://nasional.sindonews.com/read/374110/16/impor-beras-diprotas-mendag-siap-mundur-1616504627>.

<https://nasional.sindonews.com/read/374110/16/impor-beras-diprotas-mendag-siap-mundur-1616504627>.

<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/25/18371911/tak-perlu-impur-buwas-tegaskan-stok-beras-aman?page=all>.

[https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XIII-6-II-P3DI-Maret-2021-247.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-6-II-P3DI-Maret-2021-247.pdf).

[https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-X-2-II-P3DI-Januari-2018-224.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-X-2-II-P3DI-Januari-2018-224.pdf).

<https://pks.id/content/pks-pak-jokowi-2021-ada-impur-beras-41600-ton-kenapa-bapak-bilang-gak-ada>.